



The Internal Control System Analysis on the Effectiveness of Cash Receipts at Pt Pln (Persero) Kendari Branch

Kartika Resky¹, David Lisaply¹, Hamzah Hamid¹

¹ Politeknik Indotec Kendari, Indonesia

Corresponding Author  kartikaresky@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness and efficiency of internal control over cash flow within PT PLN (Persero) Kendari Branch, a State-Owned Enterprise (BUMN) in Indonesia. Effective internal control is essential to monitor both cash inflows and outflows and to support the implementation of financial policies that align with organizational objectives. The core issue addressed in this study is the adequacy of the internal control system for cash receipts and the overall effectiveness of cash receipt processes. A descriptive analysis method was employed to assess current practices. The findings reveal that the internal control system related to cash receipts is generally adequate, as evidenced by the clear separation of duties and responsibilities between the account recording function and the cash receipt function. However, regarding the effectiveness of cash collection, the use of the Payment Point Online Bank (PPOB) system has paradoxically led to an increase in the number of customers delaying payments. This suggests that while internal control mechanisms are in place, further improvements are needed in ensuring timely cash collection.

Keywords: *Internal Control System, Cash Receipts, Payment Point Online Bank*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
February 20, 2025

Revised
March 31, 2025

Accepted
April 04, 2025

Journal Homepage <https://ojs.staiafurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Sebuah perusahaan didirikan pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan. Tujuan umum perusahaan adalah mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, mencapai pertumbuhan, dan memperoleh laba yang maksimal. Dalam perkembangannya, sebuah perusahaan dituntut untuk dapat mengelola kegiatannya sekaligus dapat mengatasi masalah-masalah yang selalu timbul khususnya dibidang pengendalian hartanya. Salah satu yang paling penting adalah arus kas karena mencakup tentang penerimaan dan pengeluaran kas. Berkembangnya suatu perusahaan menyebabkan transaksi keuangan pada perusahaan tersebut semakin banyak dan kompleks. Transaksi yang terus bertambah mendorong pihak manajemen untuk lebih mengontrol dan mengawasi kegiatan transaksi yang terjadi sehari-hari secara seksama sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat diketahui dan diawasi dengan lebih baik. Setiap perusahaan menghendaki tingkat profitabilitas yang cukup tinggi sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup usahanya sampai ke masa yang akan datang. Untuk dapat mewujudkan hal itu, maka manajemen perusahaan harus melakukan tindakan pengawasan terhadap alur kas yang terjadi didalam perusahaan agar perusahaannya dapat terhindar dari kerugian.

Kas merupakan komponen yang sangat penting dalam menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan dan alat pembayaran yang siap dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas, karena kas merupakan salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kas disebut juga aktiva yang likuid (lancar), sifat kas yang likuid tidak membuat kas menjadi sangat rentan terhadap tindak kecurangan atau pencurian. Dalam mengelola kas diperlukan suatu sistem akuntansi yang dapat mengelola arus kas dengan baik agar perubahan-perubahan yang berkaitan dengan transaksi kas dapat dicatat dan dipantau dengan baik. Menurut (Laponsa, 2018) kas adalah suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai

ukuran dalam akuntansi. Sedangkan menurut (Esteria, dkk, 2016) kas adalah uang tunai dan seluruh benda atau sumber lainnya (surat berharga) yang segera tersedia untuk memenuhi kewajiban. Dari beberapa teori yang mengarah penerimaan kas perlu adanya pengontrol kas yang dapat mengontrol system penerimaan kas agar terhindar dari kecurangan dan penerimaan kas lebih efektif dan efisien.

Pengendalian intern merupakan sistem yang diperlukan untuk mengawal kegiatan sebuah perusahaan, dimana perusahaan dapat meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan dalam menilai hasil kinerja perusahaan. Sistem pengendalian intern dapat menghasilkan laporan yang dikehendaki manajemen, dapat mengamankan sumber-sumber dari pemborosan, kecurangan, dan ketidak efisienan, selain itu sistem pengendalian intern juga dapat meningkatkan ketelitian terhadap data akuntansi, juga mendorong ditaati dan dilaksanakannya kebijakan perusahaan serta meningkatkan efisiensi. Pengendalian intern sangat penting terutama pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas, karena kas salah satu aktiva yang sifatnya paling lancar. Adapun penerapan pengendalian intern penerimaan kas yaitu hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas, adanya pemisahan tugas antara individu yang menerima kas, mencatat/membukukan penerimaan kas atau yang menyimpan kas, dan setiap transaksi penerimaan kas harus didukung oleh dokumen. Sedangkan penerapan pengendalian intern pengeluaran kas yaitu penetapan tanggung jawab secara jelas, adanya pemisahan tugas dari setiap bagian yang terkait, dan melakukan pemeriksaan secara independen.

Sistem Pengendalian Intern dalam PT PLN (Persero) Cabang Kendari terutama SPI Penerimaan kas. Kajian SPI tentunya berkaitan dengan unsur pokok SPI yaitu Organisasi pemisahan tugas dan tanggungjawab, wewenang dan prosedur catatan, praktek yang sehat dan karyawan yang mempunyai keahlian.

Beberapa penelitian terdahulu (1)Desi Permatasari, Idang Nurodin, Evi Marteseli (2022) yang berjudul "Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pt. Pou Yuen Indonesia" dengan hasil penelitian Proses pengendalian internalnya yang ada masih belum sepenuhnya berjalan dikarenakan belum terdapat dewan pengawas internal dan pengeluaran bukti kas belum lengkap.(2) Arif Rahman Hakim & I Gusti Ayu Purnamawati (2022) "Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada Cv. Manik Arsa dengan hasil penelitian sistem pengendalian intern pengeluaran pada kas di CV. Manik Arsa kurang memadai dengan melihat beberapa unsur seperti berikut: Lingkungan Pengendalian. Pada CV. Manik Arsa, lingkungan pengendalian intern menjadi sebuah hal yang diharuskan mampu dipertanggungjawabkan serta diterapkan dengan baik oleh pihak yang memiliki kaitan dengan perusahaan. Artinya suatu lingkungan pengendalian diharuskan memiliki keselarasan pada tujuan perusahaan untuk memberikan peningkatan pada kinerja dari setiap perusahaan. sistem pengendalian intern pengeluaran pada kas di CV. Manik Arsa kurang memadai dengan melihat beberapa unsur seperti berikut: Lingkungan Pengendalian. Pada CV. Manik Arsa, lingkungan pengendalian intern menjadi sebuah hal yang diharuskan mampu dipertanggungjawabkan serta diterapkan dengan baik oleh pihak yang memiliki kaitan dengan perusahaan. Artinya suatu lingkungan pengendalian diharuskan memiliki keselarasan pada tujuan perusahaan untuk memberikan peningkatan pada kinerja dari setiap perusahaan.(3) Hendrik Fengky, Harijanto Sabijono dan Meily Kalalo (2019) Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Hotel Yuta Manado (Fengky et al., 2019) Hasil penelitian ini adalah sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Hotel Yuta Manado belum efektif, maka perlu diadakan roling jabatan, peningkatan sumber daya manusia untuk lebih mengenal teknologi dan menambah alat computer pada bagian kasir.(4) Renna Agustiningtya s dan Puji Astuti (2021) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kca Pada PT. Pegadaian (Persero) Upc Warujayeng (Agustiningtya s & Astuti, 2018) Hasil penelitian ini adalah prosedur pemberian KCA dan sistem pengendalian internal atas pemberian KCA di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Warujayeng telah baik namun masih ada juga rangkap jabatan. (Oktapiya, 2022).(5) Yusrin Maisaroh, Muhammad Rijalus Sholihin, dan Sarah Farhana (2019) dengan judul penelitian "Analisis Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang Pada CV PP Lumajang" Hasil peneliti tersebut

menjelaskan sistem pengendalian internal persediaan pada CV. PP Lumajang secara keseluruhan dapat dikategorikan sudah efektif karena telah memenuhi komponen pengendalian internal.

Masalah yang dihadapi yaitu berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern dalam PT PLN (Persero) Cabang Kendari terutama SPI Penerimaan kas. Kajian SPI tentunya berkaitan dengan unsur pokok SPI yaitu Organisasi pemisahan tugas dan tanggungjawab, wewenang dan prosedur catatan, praktek yang sehat dan karyawan yang mempunyai keahlian.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut : “Bagaimana sistem pengendalian internal penerimaan kas dan efektifitas penerimaan kas PT PLN (Persero) cabang Kendari”.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan kas yang diterapkan pada PT PLN (Persero) cabang Kendari dapat berfungsi dengan efektif dengan adanya sistem pengendalian internal.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Manajemen PT. PLN (Persero) cabang Kendari, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan PT PLN (Persero) cabang Kendari dalam meningkatkan dan efektifitas penerimaan kas.
2. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang manajemen keuangan dan akuntansi penerimaan kas.

LANDASAN TEORI

Penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini dilakukan oleh Rahadian NP (2007) dengan judul “Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Bawen”. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan kas pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Bawen; (2) Sejauh mana pelaksanaan sistem pengendalian intern penerimaan kas pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Bawen. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian intern yang digunakan oleh PD BPR BKK Ungaran Cabang Bawen dalam sistem penerimaan kasnya yaitu adanya pemisahan fungsi yang jelas terlihat pada bagan organisasi yang menyatakan pemisahan secara tegas, sistem otorisasi dan pencatatan yang dibuktikan dengan adanya tembusan dan salinan dokumen ke bagian terkait dan praktek yang sehat yang dibuktikan dengan adanya slip storan bernomor urut.

Menurut Bambang Hartadi (2004), Sistem Pengendalian Intern dapat mempunyai beberapa pengertian, yaitu sistem pengendalian intern dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, istilah tersebut sama dengan pengertian internal check yang merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti mencocokkan penjumlahan mendatar (horizontal) dengan penjumlahan melurus (vertikal). Dalam arti luas, sistem pengertian intern dapat dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai wawasan atau makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan.

Sistem yang dikemukakan oleh mulyadi (2001: 2) menyimpulkan bahwa sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya dengan satu sama lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur
2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan
3. Unsur tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem
4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar

Stephen a. Moscove dalam Zaki Baridwan (1993: 2) mengemukakan pengertian sistem sebagai “Suatu sistem adalah suatu entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian-bagian yang

saling berhubungan (disebut subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu". Lebih lanjut Mulyadi (2001: 5) mengemukakan sistem sebagai suatu jaringan prosedur yang dibuat sesuai dengan pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Mulyadi (2001: 5) mengemukakan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Lebih lanjut Ibnu Syamsi (1994: 1) mendefinisikan prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang saling terkait satu sama lain. Mulyadi (2001: 3) mendefinisikan sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Kemudian Zaki Baridwan (2001: 3) memberikan pengertian sistem akuntansi sebagai suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi financial dan pembuat keputusan yang relevan kepada pihak ekstern dan intern perusahaan. Definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa unsur suatu sistem akuntansi meliputi: formulir, catatan seperti jurnal serta adanya suatu laporan. Sistem akuntansi merupakan suatu bentuk sistem informasi yang bersifat keuangan. Penerapan fungsi sistem akuntansi ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Pihak intern perusahaan memanfaatkan sistem akuntansi dan hasil-hasilnya sebagai sarana di bidang perencanaan dan pengendalian, sedangkan pihak ekstern meminta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Penyajian laporan arus kas mempunyai tujuan utama untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dalam suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi ini berguna untuk ditetapkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, membayar deviden dan kebutuhan pembelanjaan extra, penentuan pengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, baik transaksi kasnya, maupun transaksi investasi non kas dan pembelanjaan selama periode tertentu dan menetapkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih yang positif dimasa yang akan datang.

Sistem pengawasan kas meliputi prosedur-prosedur yang dibuat untuk menjaga atau mengamankan dana perusahaan. Sistem ini menciptakan pengawasan internal yang cukup terhadap kas, diperolehnya data akuntansi yang tepat dan dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha serta mendorong dipenuhinya kebijaksanaan pimpinan. Istilah pengawasan intern meliputi sistem-sistem prosedur-prosedur dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak.

Kegunaan informasi arus kas sendiri adalah (a) Dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan dan peluang; (b) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flows*) dari berbagai perusahaan; (c) Untuk meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama; (d) untuk meneliti kecermatan dari transaksi arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga; (e) Digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan.

METODE

Objek dalam penelitian ini sistem penerimaan kas pada PT PLN (Persero) Cabang Kendari yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 30 Kendari. Adapun jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif merupakan data dalam bentuk penjelasan lisan dan tulisan secara singkat dan jelas mengenai permasalahan yang dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian yang

membahas tentang Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas. Berikut instrumen dalam penelitian ini:

1. Organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
 - a. Harus dipisahkan fungsi operasi dan penyimpangan dari fungsi akuntansi.
 - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap transaksi
2. Sistem wewenang dan prosedur catatan
Salah satu alat internal kontrol adalah adanya otorisasi dan pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut, misalnya pembelian yang diotorisasi dari berbagai fungsi, baik fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan dan fungsi akuntansi.
3. Praktek yang sehat
Perusahaan mempunyai kebiasaan tertentu yang dapat membantu tercapainya tujuan pengendalian intern kebiasaan tersebut dapat terwujud kebijakan perusahaan seperti pedoman kerja dan pedoman akuntansi yang memberikan petunjuk bagi para pegawai bagaimana seharusnya melaksanakan tugasnya masing-masing.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab
Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktek yang sehat tergantung pada manusianya. Hal ini mungkin terwujud jika pelaksanaan dari tugas-tugas yang ditetapkan dilaksanakan oleh ahlinya dan personal yang jujur.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan bagaimana sistem pengendalian internal terhadap efektifitas penerimaan kas pada PT PLN (Persero) Cabang Kendari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai sistem penerimaan kas maka penelitian ini terlebih dahulu membahas bagaimana sistem dan prosedur penjualan rekening listrik. Pelaksanaan pencatatan maupun pelaporan penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak terlepas dari aktifitas yang dilaksanakannya. Dalam menjalankan penjualannya PT PLN (Persero) Cabang Kendari menggunakan formulir dan catatan yang menunjang lancarnya sistem pencatatan agar dapat dipercaya kebenaran tentang laporan keuangan. Adapun formulir yang dimaksud adalah:

1. Surat permintaan penyambungan tenaga listrik yang merupakan dokumen yang diisi oleh pelanggan untuk mendapat izin penyambungan
2. Kartu meter langganan
3. Formulir pencatatan KWH meter
4. Formulir pencatatan piutang
5. Daftar rekening listrik
6. Bukti penerimaan kas

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19 ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM usahanya di bidang tenaga listrik yang semula hanya bergerak di bidang gas, kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan diatas pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (persero).

Penyediaan tenaga listrik di Propinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk pada tahun 1964 pada mulanya dilakukan dan dikelola oleh Maskapai Perusahaan Setempat (MPS). Masing-masing berkedudukan di Kendari, Bau-Bau dan Raha. Seiring dengan penyerahan pengelolaan kelistrikan diwilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dari MPS ke PLN Wilayah VIII Makassar maka pada tahun 1971 status organisasi pengelolaan kelistrikan di kota Kendari diubah menjadi unit setingkat ranting dengan nama ranting Kendari merupakan salah satu sub unit

yang berada di bawah PLN cabang Ujung Pandang. Setelah itu berturut-turut MPS-MPS yang berada di kabupaten Buton dan kabupaten Muna juga di ambil alih pengelolaannya oleh PLN Wilayah VIII.

Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keandalan pelayanan ketenagalistrikan pada tahun itu pula PT PLN (Persero) Wilayah VIII cabang Kendari membangun jaringan interkoneksi dengan Sistem Kendari dengan satu sentral Pembangkit Tenaga Listrik di PLTD Wua-Wua Kendari, penambahan kapasitas pembangkit di beberapa unit ranting dan sub ranting dan listrik desa isolated serta ikut mengambil bagian dalam program listrik masuk desa. Sampai dengan akhir tahun 1995, rasio elektrifikasi atau jumlah pelayanan listrik dari PT. PLN (Persero) cabang Kendari sebanyak 432 desa dari 809 desa yang ada atau sekitar 53,40%. Setiap perusahaan dalam menjalankan operasinya tidak lepas dari pembukuan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan yang besar karena pembukuan adalah suatu sarana untuk mencatat segala bentuk transaksi yang terjadi dalam perusahaan baik transaksi penjualan maupun penerimaan terhadap penjualan. Jenis-jenis pencatatan yang dilakukan oleh PT PLN (persero) Cabang Kendari adalah:

1. Pencatatan atas pendapatan penjualan tenaga listrik
2. Piutang yang tidak dilunasi pada akhir bulan akan dicatat pada rekening listrik yang tertunggak
3. Pencatatan penjualan rekening listrik tersebut akan dibukukan dalam tata usaha langganan

Sedangkan sistem pelaporan yang dilakukan oleh PT PLN (persero) Cabang Kendari dilakukan dalam dua cara yaitu :

1. Laporan Harian yang terdiri dari
 - a. Kartu meter langganan
 - b. Surat permintaan penyambungan listrik
2. Laporan bulanan yang terdiri dari :
 - a. Daftar rekening listrik yang lunas
 - b. Kartu catatan pembayaran rekening listrik
 - c. Daftar pengiriman rekening listrik
 - d. Bukti penerimaan kas

Adapun bagian-bagian yang terlibat dalam penjualan tenaga listrik PT PLN (persero) Cabang Kendari adalah sebagai berikut:

1. Bagian administrasi pelanggan (Pemasaran). Bagian ini berfungsi melayani semua permintaan penyambungan tenaga listrik, izin penyambungan, mengawasi pelaksanaan penyambungan, memeriksa kontrak pelanggan PLN, mencetak kartu induk data pelanggan, serta membuat surat izin penyambungan.
2. Bagian penyambungan biasa juga disebut bagian distribusi. Setelah mendapat surat izin penyambungan dan calon pelanggan sudah melunasi biaya penyambungan maka bagian ini akan melakukan pelaksanaan penyambungan tenaga listrik, maka sejak itu pelanggan tercatat sebagai kontrak pelanggan PLN.
3. Bagian pencatatan Kwh Meter. Bagian ini berfungsi melakukan pencatatan kwh meter dari setiap pelanggan. Mengelola data catatan meter. Memeriksa data, serta mengelola data tersebut menjadi rekening listrik yang dibayar tiap bulannya oleh pelanggan.
4. Bagian penagihan. Bagian ini berfungsi untuk melayani pembayaran rekening listrik dari setiap pelanggan, pelayanan pembayaran rekening giralisasi, membuat perintah pemutusan serta pendistribusian rekening listrik ke payment point
5. Bagian administrasi dan keuangan. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pencatatan akuntansi, melayani pembayaran biaya penyambungan, mengelola bank receipt serta mengelola kas.

Konsep Dasar Kerjasama *Payment Point Online Bank*

Sistem ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero) Cabang Kendari dengan konsep dasar kerjasama yaitu:

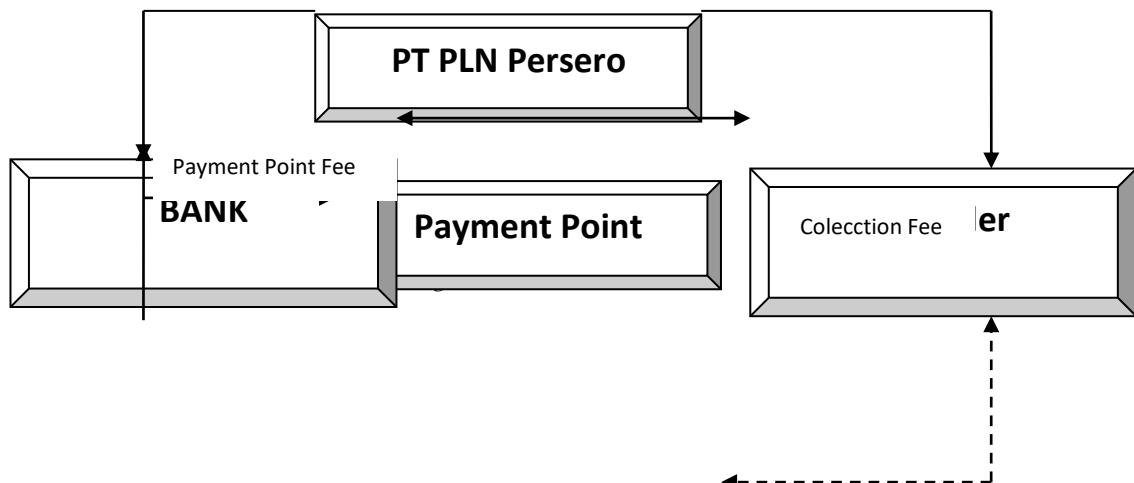
- a. PT PLN (Persero) Cabang Kendari hanya sebagai penyedia data dalam hal ini piutang tagihan rekening listrik yang sebelumnya dilakukan pencatatan oleh bagian piutang berapa rekening listrik terutang pelanggan.
- b. Bank yang telah ditunjuk yang selanjutnya disebut dengan mitra bisnis dapat mencari *payment point* sebagai *down line bank* baik dalam bentuk perusahaan maupun perorangan.
- c. Dana pelunasan yang dibayarkan oleh pelanggan harus langsung masuk ke rekening PLN dalam hal ini rekening PLN kantor pusat.
- d. Pihak PT PLN (persero) Cabang Kendari tidak memungut biaya apapun selain tagihan rekening listrik dari pelanggan.
- e. Biaya transaksi administrasi bank (giralisasi dan transfer) tidak ditanggung oleh PLN.
- f. Pelanggan hanya bisa melakukan pembayaran melalui PPOB (*Payment Point Online bank*) atau mitra bank (*down line bank*) tidak lagi dilakukan di loket kantor PLN.

Mekanisme pembayaran melalui system ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Melalui Channel Bank
 1. Teller
 2. ATM
 3. Auto Debet
 4. E - Banking
- b. Mitra *payment point Bank (downline)*
 1. Koperasi contohnya PPOB Koperasi ElektriKA (Jl. Chairil Anwar), PPOB Koperasi PKPN
 2. KUD contohnya PPOB KUD Sinar Wolasi (Konda), PPOB KUD Karya Tani (Ambaipua)
 3. LPD (Lembaga Perkreditan Desa) contohnya Yayasan Al-Furqan (Lapulu)
 4. Perorangan contohnya PPOB Manaya Cell (untuk wilayah Lepo-lepo), PPOB Ltjinta, PPOB Zahwa Elektrik, PPOB Viola (untuk wilayah Kemaraya)

Berikut disajikan skema pola kerjasama sistem PPOB

Skema 4.1. Pola Kerjasama PPOB



Skema diatas menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) melakukan kerjasama dengan bank yang ditunjuk. Bank yang bertindak sebagai *collection* akan menunjuk beberapa *payment point* yang dapat berupa perusahaan maupun perorangan. Dengan demikian bank akan mendapatkan keuntungan melalui *collection fee* dan *payment point* juga akan memperoleh keuntungan melalui pembebanan biaya administrasi kepada pelanggan yang membayar rekening listrik.

Prosedur Penerimaan Kas PT PLN Persero Cabang Kendari

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bagian ini akan membuat tagihan rekening listrik berdasarkan catatan meter kwh pelanggan. Bagian ini akan memasukkan data tersebut dalam sebuah sistem yang nantinya akan dijadikan dasar oleh pihak PPOB sebagai data tagihan kepada pelanggan PT PLN (Persero) cabang Kendari.

1. Provider

Provider disini hanya berfungsi sebagai penyedia sarana penghubung antara pihak PT PLN (Persero) dengan pihak PPOB sebagai collection tagihan rekening listrik kepada pelanggan.

2. PPOB

Bertugas dan bertanggungjawab atas tertagihnya rekening listrik pelanggan. PPOB ini akan terhubung langsung dengan pihak PT PLN (Persero) yang menerbitkan tagihan rekening listrik.

3. Pelanggan

Pelanggan mendatangi PPOB yang telah ditunjuk oleh PLN, melakukan pembayaran tagihan rekening listrik dengan membawa struk pembayaran sebelumnya yang dijadikan dasar pihak PPOB untuk menginput data dalam sistem.

4. Bagian AR Kantor Pusat PT PLN (Persero)

Menerima rekening Koran yang berisi laporan-laporan penerimaan dari kantor cabang.

5. Akuntansi dan keuangan PT PLN (Persero) Cabang Kendari

Melakukan rekonsiliasi dengan kantor pusat mengenai penerimaan tagihan rekening listrik, sehingga bagian ini dapat menentukan berapa jumlah tagihan yang tidak tertagih dan yang sudah lunas.

Sedangkan formulir-formulir yang digunakan dalam sistem dan prosedur penerimaan kas PT PLN (Persero) Cabang Kendari adalah:

1. Kartu meter langganan

Kartu ini dijadikan dasar oleh pembuat tagihan listrik untuk membuat rekening piutang tagihan listrik kepada pelanggan.

2. Formulir tagihan listrik

Merupakan bukti pelunasan tagihan listrik yang dicetak oleh PPOB.

3. Rekening Koran

Merupakan rekap transaksi rekening bank kantor pusat untuk direkonsiliasikan dengan kantor cabang tentang pelunasan tagihan rekening pelanggan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang pengendalian internal, sistem penerimaan kas PT PLN (Persero) Cabang Kendari sudah memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab antara bagian pencatat rekening dan penerimaan kas yang terpisah. Sedangkan berkaitan dengan efektifitas penerimaan kas, dimana sistem PPOB yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) belum efektif, hal ini dapat kita lihat dengan semakin tingginya jumlah pelanggan yang menunggak. Hal tersebut disebabkan oleh proses keterlambatan rekonsiliasi antara pihak PPOB, Kantor Pusat dan Kantor cabang. Sehingga proses penyampaian kepada pelanggan untuk segera melunasi tagihan rekening listrik juga mengalami keterlambatan. Adapun saran dalam penelitian ini adalah agar pihak PLN (Persero) Cabang Kendari segera melakukan rekonsiliasi penerimaan kas tagihan rekening listrik sehingga dapat dilakukan tindakan pemberitahuan kepada pelanggan yang tertunggak. Hal lain yang juga perlu diperhatikan bahwa pihak PLN lebih giat dalam melakukan sosialisasi mengenai sistem pembayaran rekening listrik secara online.

REFERENSI

Abadi, S., Kargo, M. S. A., Nyoman, N. I., & Prajayaksari, S. R. I. (2023). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN DI PT . MONANG.

- Alhempri, R. R. (2018). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN (Persero). 29(2), 61–69.
- Ardiyanto, R., Saputri, H. S., Saputri, Y. E., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh faktor demografi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu. 5(7), 3072–3080.
- Burta, F. S. (2018). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KAS PADA PT. BINTIKA BANGUNUSA MEDAN. 1, 430–439.
- Hakim, A. R., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas pada CV . Manik Arsa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 12(2), 529–537. <http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/70> Kusnia,
- Mulyadi. (2018). SISTEM AKUNTANSI (Salemba Empat (ed.); 4th ed.). 2018. Mindhari, A., Yasin, I., & Isnaini, F. (2020). Perancangan Pengendalian Internal Arus Kas Kecil Menggunakan Metode Imprest (Studi Kasus : Pt Es Hupindo). Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi, 1(2), 58–63. <https://doi.org/10.33365/jtsi.v1i2.391>
- Oktapiya, N. (2022). Analisis sistem pengendalian internal pada kasir di PT. Pegadaian cabang Rogojampi. http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/13037%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/13037/1/NILA_OKTAPIYA_fiks.pdf
- Oktaviani, B. D. A. (2018). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. 1–23. Permatasari, D., Nurodin, I., & Martaseli, E. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pt. Pou Yuen Indonesia.
- Anthony, Robert N., John Dearden dan Norton M. Bedford yang diterjemahkan Oleh Agus Mulana, 1993. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi 6. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Barry E. Chusing dalam Ruchyat Kosasih, 1995. *Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan*, Edisi III. Jakarta: Erlangga.
- George Bodward and Hopwood williams diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, 1996. *Sistem Informasi Akuntansi*, Buku 1. Jakarta: Edisi Indonesia.
- Ibnu Syamsi, 1994. *Sistem Dan Prosedur Kerja*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jonathan Sarwono, 2006. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Malayu Hasibuan, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Ke 3. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Nasution S., 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). <https://www.ojk.go.id/id/ojk-pedia/default.aspx>
- Yoan Fadillah siregar & Pirma Sibarani. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Studi Kasus pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 8(1), 2298–2308.
- Nita Ismaya, Suyanto, A. K. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Metro. Jurnal Akuntansi Aktiva, 2(2), 128–134.
- Muhammad Rizqillah Hidayat. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Studi Kasus pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 6(2), 1–25.
- P. W. Mahayusa. (2017). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Atas Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dana Program Bantuan Operasional Sekolah Sebagai Penyedia Informasi Pengendalian Internal. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi. ioiiyji